EQuator
Sabtu, 31 Desember 2011

Pengelolaan Aset Daerah Tak Maksimal

MEMPAWAH. Ketua LSM Gerakan Pro Rakyat (Geprak), Agus Suhardi meminta Pemerintah Kabupaten Pontianak serius dalam mengelola asset daerah. Pihaknya mendapatkan sejumlah asset yang terbengkalai dan tidak ditangani dengan baik. Padahal, keberadaan asset itu sangat penting dan strategis.

"Kami banyak mendapatkan persoalan asset yang tidak dikelola dengan serius oleh pemerintah daerah. Akibat ketidakseriusan itulah yang menyebabkan banyak asset yang tidak ditangani dengan baik dan merugikan daerah," kata Agus kepada koran ini, Jumat (30/12) di Mempawah.

Seperti, Agus mengungkapkan, Kantor UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Sungai Pinyuh yang status kepemilikannya tidak jelas. Bahkan, belakangan ini beredar kabar kantor tersebut akan dirobohkan lantaran lahan yang berada di bangunan tersebut akan dijual oleh pemiliknya.

"Kita sesalkan mengapa pemerintah daerah ceroboh dalam menempatkan asetnya. Sehingga muncul persoalan seperti ini. Tentu saja hal ini akan sangat merugikan daerah. Sebab, berapa besar anggaran yang telah dikucurkan untuk membangun UPT tersebut dan sekarang akan dirobohkan," paparnya.

Bahkan, imbuh Agus, beberapa waktu lalu juga terjadi kasus yang sama di Kecamatan Sungai Pinyuh. Salah satu asset dinas pendidikan di Kecamatan Sungai Pinyuh telah dirobohkan bangunannya oleh masyarakat pemilik lahan. Sebab, lahan tersebut merupakan milik masyarakat yang sampai saat ini statusnya belum dibebaskan.

"Seharusnya sejak dulu pemerintah daerah telah membebaskan lahan yang akan dibangun asset. Sehingga setelah dibangun, asset tersebut murni milik pemerintah daerah dan tidak ada yang bisa mengganggunya," ujarnya.

Bukan hanya itu, Agus juga mendapatkan pengelolaan beberapa asset daerah yang belum dilakukan dengan maksimal. Bahkan, beberapa waktu lalu menjadi bahan rekomendasi dan temuan Pansus DPRD Kabupaten Pontianak terhadap temuan BPK.

"Masih ada asset alat berat di work shop Anjongan yang tidak jelas keberadaannya. Padahal, keberadaan alat berat ini menjadi salah satu poin rekomendasi Pansus DPRD untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki. Namun sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan," tuturnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Pontianak khususnya yang menangani bidang asset daerah agar lebih maksimal dan profesional dalam mengelola asset. Sebab, asset merupakan salah satu poin penting dalam pendataan dan perhitungan BPK.

"Masalah asset ini sudah sering menjadi temuan BPK. Namun mengapa belum juga dibenahi dan diperbaiki pengelolaannya. Kami meminta bidang asset lebih fokus dan maksimal menginventarisir keberadaan asset. Agar keberadaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," sarannya. (shn)

Membunyikan terompet merupakan salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat untuk menyambut dan memeriahkan perayaan tahun baru. Menjelang pergantian tahun 2012, sejumlah pedagang menjual terompet rela keliling di rumah-rumah warga. ALFY SANDI/EQUATOR